

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok masyarakat yang masih sering mendapatkan diskriminasi di masyarakat. Hal ini mengakibatkan sempitnya kesempatan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas untuk memperoleh kehidupan yang setara dengan masyarakat non-disabilitas. Salah satunya dalam dunia kerja, kesempatan memperoleh pekerjaan cenderung lebih rendah bagi para penyandang disabilitas dibandingkan dengan non-disabilitas (Erisa & Widinarsih, 2022). Hal ini juga dibuktikan dalam survey yang dilakukan oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 dengan catatan bahwa dari total 8 juta angkatan kerja penyandang disabilitas, hanya 9 persennya yang terserap sebagai tenaga kerja.

Penyandang disabilitas yang meliputi disabilitas fisik, mental, sensorik, atau gabungan dari ketiganya seringkali mendapat kesulitan dalam mengakses pendidikan, lapangan kerja, layanan kesehatan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dalam bermasyarakat, para penyandang disabilitas masih mendapatkan diskriminasi dan stigma yang dapat menghambat potensi dan pemenuhan hak yang setara dengan masyarakat non-disabilitas. Selain itu, kurangnya aksesibilitas fisik dan informasi di banyak tempat juga menjadi salah satu penghalang utama bagi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi di dalam masyarakat. Akses terhadap sumber daya dan layanan yang kurang seringkali membuat para penyandang disabilitas merasa terpinggirkan dan kurang diakui dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Disebutkan oleh Widjaja et al (2020) bahwa perusahaan-perusahaan memberikan persyaratan yang sangat tinggi bagi para penyandang disabilitas, salah satunya pendidikan yang tinggi. Persyaratan yang tinggi ini menjadi salah satu penyebab sedikitnya angkatan kerja penyandang disabilitas yang terserap sebagai tenaga kerja. Penyandang disabilitas banyak yang bekerja sebagai buruh, pekerja pertanian, pekerja non-tani, pekerja keluarga, hingga yang terbanyak, wirausaha.

Berdasarkan data yang diperoleh dari databoks.katadata.co.id, pada tahun 2022, proporsi pekerja disabilitas berstatus memiliki usaha sendiri mencapai 0,81% dari total penduduk yang bekerja secara nasional. Penyandang disabilitas yang memiliki usaha sendiri memerlukan banyak skill keterampilan yang dapat dijadikan bidang usaha.

Oleh karena itu, pusat pemberdayaan disabilitas diperlukan dengan pendekatan yang komprehensif, serta tidak hanya mencakup penyediaan aksesibilitas fisik, melainkan juga mendukung pengembangan keterampilan, kemandirian, dan inklusi para penyandang disabilitas. Pengadaan pusat pemberdayaan disabilitas ini dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk menyediakan sarana yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas dan masyarakat di sekitarnya.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang tengah berupaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Tertulis pada UU No 8 Tahun 2016 tentang disabilitas telah diatur tentang hak-hak penyandang disabilitas seperti hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan hingga hak pekerjaan. Meski begitu, hingga saat ini para penyandang disabilitas belum dapat merasakan langkah konkret pemerintah dalam pemenuhan hak-hak mereka. Berbagai akses dalam mendapatkan pendidikan, hingga pekerjaan, masih mendiskriminasi penyandang disabilitas. Menurut PJ Gubernur Jateng, Nana Sudjana yang diwartakan oleh [TribunBanyumas](http://tribunbanyumas.com), akses bagi penyandang disabilitas masih sulit dan Pemprov Jateng akan terus melakukan langkah-langkah untuk memaksimalkan hak penyandang disabilitas.

Menurut data yang dicatat oleh Dinsos Provinsi Jateng (2022), jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Jateng mencapai 188.439. Sementara itu, menurut data statistik Dinsos Semarang pada periode oktober 2020, jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang berjumlah 3.191 jiwa. Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Maka dari itu, perancangan Pusat Rehabilitasi Vokasional Disabilitas Fisik dan Sensorik dapat direncanakan di Kota Semarang dengan sasaran pengguna penyandang disabilitas di Jawa Tengah.

Terdapat beberapa pelatihan vokasional penyandang disabilitas yang terdapat di Semarang. Meski begitu, Kota Semarang tidak memiliki tempat khusus yang dapat memfasilitasi kegiatan tersebut, sehingga untuk melakukan pelatihan vokasional, penyelenggara harus terus mencari tempat.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana fasilitas yang sesuai dan fungsional dalam Perancangan Pusat Rehabilitasi Vokasional Disabilitas dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku guna melengkapi fasilitas khusus penyandang disabilitas yang ada di Indonesia.

1.3 Tujuan

1. Terwujudnya rancangan Pusat Rehabilitasi Vokasional Disabilitas dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku dengan fasilitas yang lengkap dan memadai sebagai wadah pelatihan prakerja penyandang disabilitas.
2. Menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) berjudul Perancangan Pusat Rehabilitasi Vokasional Disabilitas Fisik dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku di Kota Semarang.

1.4 Ruang Lingkup

1.1.1 Substansial

Ruang lingkup substansial dalam penulisan Landasan Program Perencanaan dan perancangan Arsitektur (LP3A) ini menitikberatkan pada berbagai macam hal yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan sarana pelatihan kerja khususnya Pusat Rehabilitasi Vokasional Disabilitas Fisik dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur

1.1.2 Spasial

Ruang lingkup spasial dari Perancangan Pusat Pemberdayaan Disabilitas Fisik dan Sensorik ini berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Metode

1.1.3 Metode Deskriptif

Metode deskriptif merupakan metode penelitian dengan kegiatan pengumpulan data. Pengumpulan data dalam metode ini dapat dilakukan dengan studi pustaka/literatur, data wawancara dengan narasumber, data dari instansi terkait, serta data observasi lapangan dan *browsing* internet.

1.1.4 Metode Dokumentatif

Metode dokumentatif merupakan kegiatan dokumentasi data yang menjadi bahan penulisan landasan ini. Dokumentasi data dikumpulkan dengan pengambilan foto saat survey lapangan atau saat *browsing* internet.

1.1.5 Metode Komparatif

Metode komparatif merupakan kegiatan studi banding terhadap bangunan yang memiliki tipologi serupa.

Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dan penyusunan LP3A Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi ide pokok dan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, lingkup pembahasan, metode pembahasan, sistematika pembahasan, serta alur pikir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi literatur mengenai studi referensi dan studi preseden.

BAB III TINJAUAN LOKASI DAN PENGGUNA

Berisi tinjauan lokasi, lahan objek, dan pengguna.

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Berisi analisis dan dasar pendekatan program perancangan, yaitu analisis pelaku dan aktivitasnya, hubungan kelompok ruang, kebutuhan ruang, sirkulasi, pendekatan konsep perancangan secara fungsional, kinerja, kontekstual, teknis, dan arsitektural.

BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Berisi rumusan dari hasil kajian dan analisis berupa program ruang, konsep dasar perancangan dan karakter tapak terpilih serta kesimpulan-kesimpulan yang akan digunakan sebagai dasar dan acuan dalam studio grafis,

BAB VI KESIMPULAN

Berisi hasil akhir dari tinjauan pada bab sebelumnya, serta batasan kriteria yang akan dilakukan dalam proses perencanaan dan perancangan.

1.5 Alur Pikir

Latar Belakang

Aktualita:

- Hanya sedikit penyandang disabilitas yang terserap menjadi sebagai tenaga kerja.
- Mayoritas penyandang disabilitas berwirausaha sendiri.
- Persyaratan tinggi bagi penyandang disabilitas, seperti syarat pendidikan tinggi.

Urgensi:

- Dibutuhkan fasilitas yang dapat mewadahi kegiatan latihan prakerja untuk para disabilitas agar para penyandang disabilitas mendapatkan akses pekerjaan yang setara dengan non-disabilitas

Originalitas:

- Perencanaan dan perancangan Pusat Rehabilitasi Vokasional Disabilitas yang memadai, lengkap, dan dapat mewadahi berbagai aktivitas pengembangan ketrampilan penyandang disabilitas dengan pendekatan Arsitektur Perilaku

Rumusan Masalah

Bagaimana fasilitas yang sesuai dan fungsional dalam Perancangan Pusat Rehabilitasi Vokasional Disabilitas di Kota Semarang dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku guna melengkapi fasilitas khusus penyandang disabilitas yang ada di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

- Tinjauan Pusat Pemberdayaan Disabilitas
- Tinjauan Arsitektur Perilaku
- Tinjauan Universal Design
- Tinjauan Preseden

Tinjauan Lokasi dan Pengguna

- Tinjauan Kota Semarang
- Tinjauan Lokasi lahan
- Peraturan Pemerintah tentang Bangunan
- Tinjauan Pengguna

Perencanaan

- Perilaku dan Aktivitas
- Hubungan Ruang
- Persyaratan Ruang
- Utilitas Bangunan
- Penekanan Desain
- Data Tapak

Analisa

Melakukan analisa terhadap tinjauan pustaka, tinjauan lokasi, dan studi preseden untuk menghasilkan pelaku, kegiatan, kebutuhan ruang, konsep perancangan, dll.

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A)